

ABSTRAK

KHAIRU ALAMSYAH
NIM. 200510291

Implementasi Pelaksanaan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Harun S.H., M.H. & Hasan Basri S.H., M.H.)

Pembangunan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian, namun seringkali terhambat oleh masalah pengadaan tanah. Meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 telah mengatur mekanisme ganti rugi yang adil dan transparan, implementasinya sering menimbulkan sengketa. Sebagai contoh, di Kecamatan Kejuruan Muda, terdapat penolakan dari warga terkait besaran uang ganti kerugian (UGK) yang dianggap tidak sesuai, yang akhirnya memicu konflik dan menghambat kelancaran proyek. Penelitian ini menganalisis implementasi ganti rugi, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ganti rugi, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pemerintah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur nasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan dan melakukan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok/ utama. Lokasi penelitian ini berada di Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan 2 tahap : observasi dan wawancara (*interview*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN Aceh Tamiang melaksanakan pengadaan tanah sesuai peraturan, termasuk penetapan ganti rugi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Prosesnya terdiri dari tiga tahap: Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan. Kendala utama berasal dari masyarakat, pemerintah, dan pelaksana, seperti ketidaklengkapan dokumen, serta perbedaan pandangan tentang ganti rugi. Untuk mengatasi kendala ini, BPN menerapkan langkah strategis berdasarkan regulasi, seperti pembentukan tim appraisal, sosialisasi, dan musyawarah guna mencapai kesepakatan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti kerugian tanah oleh BPN Aceh Tamiang telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021. Prosesnya melalui tahapan Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan, dengan prinsip keadilan dan kewajaran meskipun ada beberapa keberatan dari masyarakat yang dapat diajukan ke pengadilan. Kendala yang dihadapi antara lain ketidaklengkapan dokumen, ketidakhadiran pemilik saat pengukuran, serta perbedaan pendapat mengenai besaran ganti kerugian. BPN Aceh Tamiang telah melaksanakan proses dengan prosedur yang jelas, mulai dari appraisal hingga

pembayaran ganti kerugian secara transparan dan adil, untuk mendukung pembangunan jalan tol yang bermanfaat bagi ekonomi daerah.

Kata Kunci :Pengadaan tanah, Ganti kerugian, Keadilan, Konflik sosial.

SUMMARY

KHAIRU ALAMSYAH
NIM. 200510291

Implementasi Pelaksanaan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Harun S.H., M.H. & Hasan Basri S.H., M.H.)

The construction of toll roads aims to improve connectivity and the economy but is often hindered by land acquisition issues. Although Law No. 2 of 2012 regulates compensation to ensure fairness and transparency, its implementation still leads to disputes. An example in the Kejuruan Muda District illustrates residents' rejection of compensation money (UGK) deemed inadequate, triggering conflict and delaying the project. This study analyzes the implementation of compensation, the challenges faced, and efforts to resolve them.

This study aims to examine the implementation of compensation, identify obstacles in its execution, and analyze the dispute resolution efforts undertaken by the government. The research findings are expected to provide policy recommendations to enhance justice and effectiveness in land acquisition for national infrastructure development.

The research uses an empirical juridical research method, involving field surveys and interviews as primary data collection tools. The research location is Bukit Rata Village, Kejuruan Muda District, Aceh Tamiang Regency. Data collection is conducted through field research in two stages: observation and interviews.

The results show that BPN Aceh Tamiang conducts land acquisition in accordance with regulations, including the determination of compensation based on Government Regulation No. 19 of 2021. The process consists of three stages: Planning, Preparation, and Implementation. The main challenges stem from the community, government, and implementers, such as incomplete documentation and differing views on compensation. To address these challenges, BPN has implemented strategic steps based on regulations, including the formation of an appraisal team, socialization, and deliberation to reach an agreement.

The conclusion of this study shows that BPN Aceh Tamiang has followed the procedures set out in Law No. 2 of 2012 and Government Regulation No. 19 of 2021 for compensation. The process goes through Planning, Preparation, and Implementation stages with fairness and justice, although some objections from the community may be addressed through the courts. The challenges faced include incomplete documents, absentee landowners during measurements, and differing opinions on compensation amounts. BPN Aceh Tamiang has followed a clear process, from appraisal to transparent and fair compensation payment, supporting the toll road project that benefits the region's economy.

Keywords: Land acquisition, Compensation, Justice, Social Conflict.